Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PEMIKIRAN ISLAM KIRI HASSAN HANAFI SEBAGAI KRITIK TERHADAP PERLAKUAN UNI EMIRAT ARAB KEPADA PEKERJA MIGRAN

Aisyah Dwi Aprilia[1], Dhea Kamila Nur Jamal[2], Muhammad Sulthan Fatih[3], Sandra Aulia Sabina[4], Anwar Ilmar[5], Mukhamad Busro Amuni[6]

[123456] Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

emailpenulis
2310413194@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310413076@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310413084@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310413038@mahasiswa.upnvj.ac.id

A B S T R A K

Penelitian ini membahas paradoks antara identitas Islam Uni Emirat Arab (UEA) dan realitas sosial-ekonomi yang dialami pekerja migran, khususnya terkait praktik ketenagakerjaan yang bersifat eksploitatif. Modernisasi dan pembangunan pesat UEA sangat bergantung pada tenaga kerja migran dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, namun keberadaan mereka sering diiringi dengan kondisi kerja yang tidak manusiawi, minimnya perlindungan hukum, serta ketidakadilan struktural yang dilembagakan melalui sistem kafala. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi dokumen, penelitian ini menelaah bagaimana pemikiran Islam Kiri Hassan Hanafi dapat digunakan sebagai kerangka teoretis untuk mengkritik ketimpangan tersebut. Pemikiran Hanafi yang menekankan keadilan sosial, pembelaan terhadap al-mustadh'afin, serta transformasi teologi menjadi praksis sosial memberikan perspektif kritis terhadap kontradiksi antara nilai-nilai Islam dan praktik neoliberal yang dianut UEA. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan terhadap pekerja migran tidak hanya melanggar prinsip moral universal, tetapi juga bertentangan dengan etika keadilan Islam sebagaimana dikemukakan Hanafi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya reorientasi nilai keadilan dalam kebijakan ketenagakerjaan negara-negara Teluk agar lebih selaras dengan prinsip kemanusiaan yang diajarkan Islam.

Kata Kunci: Hassan Hanafi, Islam Kiri, kafala, keadilan sosial, pekerja migran, Uni Emirat Arab.

A B S T R A C T

This study examines the paradox between the Islamic identity of the United Arab Emirates (UAE) and the socio-economic realities experienced by migrant workers, particularly regarding exploitative labor practices. The rapid modernization and economic growth of the UAE rely heavily on migrant labor from South and Southeast Asia, yet these workers often face inhumane working conditions, limited legal protection, and structural inequalities reinforced by the kafala sponsorship system. Employing a qualitative approach and document analysis, this research explores how Hassan Hanafi's Left Islam provides a theoretical framework to critique these injustices. Hanafi's emphasis on social justice, the defense of al-mustadh'afin, and the transformation of theology into social praxis offers a critical lens through which to understand the contradiction between Islamic values and the neoliberal practices adopted by the UAE. Findings indicate that the treatment of migrant workers violates not only universal moral principles but also core Islamic ethical teachings on justice. Thus, this study highlights the need for a value reorientation within Gulf labor policies to align more closely with the humanitarian principles embedded in Islamic teachings.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



***Keywords**: Hassan Hanafi, Left Islam, kafala, social justice, migrant workers, United Arab Emirates.*

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi di kawasan Uni Emirat Arab (UEA) memperlihatkan kemajuan luar biasa dalam waktu singkat. Negara tersebut berhasil bertransformasi menjadi pusat modernitas dengan gedung pencakar langit dan kemewahan yang menjadi simbol keberhasilan ekonomi global. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan pembangunan yang ambisius di sektor konstruksi, energi, dan pariwisata yang menarik perhatian global. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat ketergantungan besar terhadap tenaga kerja asing yang didatangkan dari negara-negara berkembang seperti India, Bangladesh, Filipina, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Pekerja migran inilah yang menopang sektor vital seperti konstruksi, pelayanan domestik, dan industri jasa yang menjadi fondasi ekonomi UEA. Menurut Guthrie (2023), hampir seluruh infrastruktur megah di UEA dibangun oleh tenaga kerja migran yang menghadapi risiko kerja berat, jam kerja panjang, dan perlindungan hukum yang minim. Ketimpangan ini muncul karena sistem *kafala* atau sponsor menjadikan pekerja bergantung penuh pada majikan untuk izin tinggal dan pekerjaan. Hubungan kerja seperti ini menempatkan pekerja migran berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan.

Kondisi ini menjadi paradoks yang mencolok ketika dikaitkan dengan identitas UEA sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Islam menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, tapi kenyataannya prinsip tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik sosial dan kebijakan ketenagakerjaan di negara tersebut. Menurut Hamza (2015), sistem *kafala* yang dijalankan di negara-negara Teluk telah menimbulkan stratifikasi sosial yang menempatkan warga lokal sebagai kelas dominan dan pekerja migran sebagai kelas subordinat. Mereka yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara seringkali menghadapi diskriminasi sistematis, baik dalam akses terhadap keadilan maupun dalam perlakuan di tempat kerja. Parrenas dan Silvey (2016) bahkan mencatat bahwa pekerja domestik di UEA tidak termasuk dalam perlindungan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga mereka lebih rentan terhadap pelecehan, kekerasan, dan kerja paksa. Situasi ini menimbulkan pertanyaan etis dan religius yang mendasar mengenai sejauh mana ajaran Islam diterapkan dalam sistem sosial dan ekonomi negara yang mengaku berlandaskan nilai-nilai Islam. Pertentangan ini menunjukkan adanya jarak yang lebar antara idealisme religius dan realitas sosial yang penuh ketimpangan.

Pemikiran Hassan Hanafi mengenai Islam Kiri dalam kasus ini memberikan kerangka teoretis yang relevan untuk memahami ketegangan antara ajaran agama dan praktik sosial di dunia Islam modern. Menurut Rosyadi (2022), Hanafi menggagas Islam Kiri sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Barat dan ketimpangan sosial yang menimpa umat Islam. Ia memandang bahwa Islam seharusnya menjadi kekuatan pembebas bagi kaum tertindas dan tidak boleh dijadikan alat legitimasi bagi kekuasaan yang menindas. Gagasannya berlandaskan pada tiga pilar utama, yakni revitalisasi khazanah Islam klasik, kritik terhadap peradaban Barat, dan analisis terhadap realitas sosial umat Islam. Bagi Hanafi, teologi harus diubah menjadi gerakan praksis yang berorientasi pada perubahan sosial dan ekonomi yang adil. Pemikiran ini muncul dari pengamatannya terhadap penderitaan masyarakat dunia Islam yang mengalami penjajahan dan eksploitasi, baik dari kekuatan eksternal maupun internal. Melalui Islam Kiri, Hanafi mengajak umat Islam untuk membumikan nilai-nilai

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



keadilan sosial dan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dalam konteks modern. Ajaran Islam, bagi Hanafi, adalah kekuataan moral dan intelektual yang menuntut pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan sosial.

Kesenjangan antara idealisme keagamaan dan realitas sosial tampak jelas dalam struktur sosial-ekonomi UEA. Negara ini menggunakan simbol Islam dalam kehidupan publiknya, tapi dalam praktiknya menerapkan sistem ekonomi neoliberal yang menempatkan efisiensi dan keuntungan di atas nilai kemanusiaan. Menurut Parrenas dan Silvey (2016), penerapan sistem *kafala* justru memperdalam ketimpangan sosial dan melanggengkan bentuk perbudakan modern di kalangan pekerja domestik. Hal ini menggambarkan bagaimana modernisasi di negara-negara Islam seringkali diiringi oleh dehumanisasi terhadap kelas pekerja. Hal serupa juga terjadi pada pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dan negara teluk lainnya, dimana banyak di antara mereka menghadapi kekerasan, diskriminasi, bahkan hukuman mati tanpa perlindungan diplomatik yang memadai (Pangestu et al., 2020). Kesenjangan ini menandakan bahwa modernitas di dunia Islam masih diwarnai oleh kontradiksi antara simbolisme religius dan praktik ekonomi yang eksploitatif. Dalam konteks tersebut, kritik Hassan Hanafi terhadap ketimpangan sosial menjadi penting untuk menyoroti bagaimana sistem politik dan ekonomi di negara Islam seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi inti ajaran Islam.

Kajian terhadap pemikiran Hassan Hanafi juga memiliki relevansi filosofis dan praktis yang luas bagi wacana keislaman kontemporer. Di tengah arus globalisasi dan kapitalisme modern, banyak negara Islam terjebak dalam pola pembangunan yang mengorbankan aspek kemanusiaan demi pertumbuhan ekonomi. UEA adalah contoh konkret dari situasi dimana agama dijadikan identitas formal negara, tapi nilai-nilainya tidak terimplementasi secara substantif dalam kebijakan sosial. Pemikiran Islam Kiri menawarkan alternatif dengan menempatkan manusia sebagai pusat nilai dan tujuan pembangunan. Islam, dalam pandangan Hanafi, harus menjadi kekuatan emansipatoris yang berpihak pada kaum lemah dan tertindas. Kajian ini penting karena dapat membuka refleksi baru mengenai bagaimana konsep keadilan sosial Islam diterapkan dalam konteks global yang sarat ketimpangan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai teologi pembebasan Islam yang menggabungkan dimensi spiritual, etis, dan sosial secara seimbang.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji ulang pemahaman mengenai Islam sebagai ajaran yang memihak pada kaum tertindas dan menentang segala bentuk ketidakadilan struktural. Pemikiran Islam Kiri Hassan Hanafi menawarkan pendekatan kritis yang dapat digunakan untuk menganalisis relasi kuasa dan ketimpangan sosial yang muncul dan sistem kerja di UEA. Kajian ini juga relevan dalam konteks akademik karena memperkaya diskursus mengenai hubungan antara agama, politik, dan ekonomi dalam dunia Islam kontemporer. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teologi pembebasan Islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek spiritual, melainkan juga pada transformasi sosial. Melalui pendekatan ini, Islam diposisikan sebagai kekuatan moral yang mampu menantang struktur kekuasaan yang menindas. Kajian mengenai praktik ketenagakerjaan di UEA menjadi penting karena membuka ruang kritik terhadap kontradiksi antara simbolisme keagamaan dan realitas sosial-ekonomi yang timpang. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa keadilan sosial bukan hanya ideal teologis, melainkan kewajiban moral yang melekat dalam setiap sistem sosial Islam.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemikiran Islam Kiri Hassan Hanafi dapat digunakan untuk mengkritik perlakuan Uni Emirat Arab terhadap pekerja migran?
2. Bagaimana nilai-nilai keadilan sosial Islam dalam pemikiran Hassan Hanafi dapat diterapkan untuk menanggapi ketimpangan global dan praktik kerja yang bersifat eksploitatif?

2. TELAAH LITERATUR

Kajian mengenai ketidakadilan struktural terhadap pekerja migran di kawasan Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah menjadi fokus penelitian global dalam kajian migrasi, hak asasi manusia, dan ekonomi politik Timur Tengah. Literatur memperlihatkan bahwa akar permasalahan terletak pada **sistem kafala**, yaitu mekanisme sponsorship yang mengikat status legal pekerja kepada majikan. Menurut Vora (2013), sistem kafala tidak hanya memfasilitasi ketergantungan pekerja terhadap sponsor, tetapi juga menciptakan "regime of control" yang menormalkan pengawasan ketat, kerja paksa, dan pembatasan kebebasan bergerak. Hal ini sejalan dengan penelitian Gardner (2010) yang menyatakan bahwa kafala merupakan fondasi struktural yang memungkinkan eksploitasi terhadap jutaan pekerja migran di UEA dan Qatar.

Penelitian oleh Pande (2013) juga menegaskan bahwa pekerja domestik perempuan berada dalam posisi yang paling rentan, karena mereka bekerja di ruang privat yang tidak diatur oleh hukum ketenagakerjaan, sehingga meningkatkan risiko kekerasan fisik dan psikologis. Hal ini didukung oleh De Bel-Air (2018), yang menemukan bahwa lebih dari 90% pekerja domestik di negara Teluk berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, sebuah komposisi demografis yang memfasilitasi stereotip rasial dan hierarki etnis yang digunakan untuk menjustifikasi pekerjaan berupah rendah.

Literatur lain menunjukkan bahwa modernisasi dan pertumbuhan ekonomi UEA berjalan paralel dengan praktik eksploitatif terhadap pekerja migran. Menurut Keane dan McGeehan (2008), pembangunan Dubai sebagai "global city" dibangun di atas tenaga kerja migran yang bekerja dalam kondisi ekstrem, termasuk suhu yang sangat panas, upah rendah, dan minimnya hak istirahat. Temuan ini diperkuat oleh Jureidini (2009), yang menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Teluk tidak akan mungkin terjadi tanpa "hyper-precarious labor regime," yaitu model ketenagakerjaan yang sengaja diciptakan agar pekerja tetap mudah diganti, tidak memiliki daya tawar, dan tidak mungkin melakukan perlawanan kolektif.

Dalam konteks kajian teoretis, pemikiran Islam Kiri Hassan Hanafi memberikan landasan ideologis yang relevan untuk menilai hubungan antara ajaran Islam dan praktik ketidakadilan di negara-negara Islam modern. Menurut Hanafi (1989) dalam karya *From Dogma to Revolution*, teologi harus diubah menjadi praksis sosial yang berpihak kepada "al-mustadh'afin"—mereka yang tertindas dalam struktur ekonomi dan politik. Pemikiran ini diperdalam oleh Abu-Rabi' (2003), yang menjelaskan bahwa proyek Islam Kiri Hanafi merupakan upaya historis untuk membangun teologi pembebasan versi Islam, dengan menempatkan keadilan sosial sebagai inti dari ajaran agama.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Kajian Rosyadi (2022) menegaskan bahwa Islam Kiri Hanafi melakukan kritik terhadap dua hal: dominasi epistemologis Barat dan ketimpangan internal dunia Islam, termasuk eksploitasi oleh elite politik-ekonomi. Literatur juga menunjukkan bahwa pemikir seperti Asif Bayat (2013) dan Ali Shariati (1979) memiliki resonansi dengan gagasan Hanafi, karena membayangkan Islam sebagai kekuatan emansipatoris yang memerangi ketidakadilan struktural, kapitalisme predatoris, dan dominasi kelas.

Sementara itu, literatur mengenai pekerja migran Indonesia di negara Teluk menunjukkan pola eksploitasi yang serupa. Menurut Killias (2018), pekerja domestik Indonesia kerap mengalami kekerasan, pemotongan gaji, penyekapan, hingga pemalsuan dokumen oleh agen perekrutan maupun majikan. Di Arab Saudi dan UEA, banyak kasus kriminalisasi pekerja migran terjadi karena ketidakpahaman hukum lokal dan minimnya perlindungan diplomatik (Lindquist, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi pekerja migran bukanlah kasus individual, tetapi merupakan struktur yang sistemik dan reproduktif.

Dengan demikian, literatur menunjukkan dua temuan besar:
(1) Eksploitasi terhadap pekerja migran di UEA dan negara Teluk merupakan fenomena struktural, bukan insidental, yang berakar pada sistem kafala dan praktik ekonomi neoliberal;
(2) Pemikiran Islam Kiri Hassan Hanafi menawarkan kerangka teoretis untuk mengkritik ketimpangan tersebut, terutama mengenai paradoks antara identitas Islam negara Teluk dan realitas eksploitatif yang dialami para pekerja.

Kajian-kajian ini memperlihatkan bahwa terdapat jurang antara simbolisme keagamaan negara-negara Teluk dan praktik mereka yang tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Literatur akademik secara konsisten menegaskan bahwa ketidakadilan struktural tersebut tidak hanya melanggar norma moral universal, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam tentang martabat manusia, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok tertindas—nilai-nilai yang menjadi pusat dari pemikiran Islam Kiri Hassan Hanafi.

3. LANDASAN TEORI

3.1 Teori islam kiri hassan hanafi

Islam Kiri merupakan proyek pemikiran Hassan Hanafi yang bertujuan untuk menempatkan Islam sebagai kekuatan pembebasan sosial bagi kelompok-kelompok yang mengalami ketertindasan. Hanafi mengembangkan gagasan ini untuk menantang teologi tradisional yang menurutnya terlalu fokus pada aspek metafisis dan kurang memperhatikan realitas sosial yang dihadapi umat manusia. Dalam Left Islam (Indoprogress, 2013), Hanafi menegaskan bahwa teologi Islam tidak boleh terpisah dari kebutuhan manusia sehari-hari, terutama kelompok yang tertindas. Ia menyatakan secara tegas bahwa "Teologi harus berpihak pada manusia tertindas; dari Tuhan kembali ke manusia, dari langit kembali ke bumi" (Hassan Hanafi, Left Islam, Indoprogress, 2013). Kutipan ini menunjukkan bahwa menurut Hanafi, agama hanya menjadi bermakna ketika ia berfungsi sebagai alat pembelaan terhadap mereka yang berada dalam kondisi ketidakadilan dan eksploitasi.

Dalam kerangka teologi pembebasan yang dikembangkan Hanafi, manusia bukan hanya menjadi subjek, tetapi juga pusat dari agenda teologis. Teologi, bagi Hanafi, harus terlibat langsung dalam pembebasan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang menindas. Oleh sebab itu, fokus teologi harus bergeser dari sekadar pembahasan tentang Tuhan dan hal-hal gaib

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



menuju pembahasan mengenai kondisi manusia dan sejarahnya. Hal ini terlihat ketika Hanafi menulis bahwa "Arah teologi harus berubah dari kajian tentang Tuhan menjadi pembelaan atas manusia dan sejarahnya" (Hassan Hanafi, Left Islam, Indoprogress, 2013). Dengan demikian, teologi pembebasan versi Hanafi bertujuan untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan transformasi sosial, bukan sekadar legitimasi bagi kekuasaan atau status quo.

Ketika gagasan Islam Kiri ini diterapkan pada kasus perlakuan terhadap pekerja migran di Uni Emirat Arab (UEA), konsep Hassan Hanafi memberikan kerangka kritik yang tajam dan relevan. Realitas sosial di UEA menunjukkan bahwa banyak pekerja migran menghadapi eksploitasi berupa jam kerja panjang, upah yang tidak sepadan, penyitaan paspor, dan minimnya perlindungan hukum. Dalam perspektif Islam Kiri, kondisi ini menunjukkan keberadaan struktur penindasan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Islam. Teologi pembebasan Hanafi menuntut agar negara—terutama negara yang mengklaim berdiri atas dasar Islam—menempatkan manusia sebagai pusat kepentingan moral. Sejalan dengan pemikirannya, Hanafi kembali menegaskan bahwa "Agama menjadi otentik ketika membela manusia yang tertindas dan melawan struktur penindasan" (Hassan Hanafi, Left Islam, Indoprogress, 2013). Oleh karena itu, perlakuan negara terhadap pekerja migran menjadi indikator sejauh mana praktik sosial politiknya selaras atau justru bertentangan dengan prinsip keadilan sosial Islam yang dikemukakan Hanafi.

3.2 Konsep-Konsep Yang digunakan

Konsep Islam Kiri yang dikembangkan oleh Hassan Hanafi merupakan pendekatan pemikiran yang menempatkan agama sebagai sarana perjuangan untuk membebaskan kelompok yang mengalami ketertindasan. Dalam kajian mengenai kritik terhadap perlakuan Uni Emirat Arab terhadap pekerja migran, Islam Kiri memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menilai bagaimana agama seharusnya bersikap ketika terjadi ketidakadilan dalam sistem sosial maupun kebijakan negara. Hanafi memformulasikan Islam Kiri sebagai upaya mengalihkan fokus teologi dari persoalan-persoalan abstrak menuju perhatian langsung pada situasi manusia. Dalam karyanya Left Islam (Indoprogress, 2013), ia menegaskan bahwa teologi tidak boleh berhenti pada pembahasan ketuhanan secara teoritis, tetapi harus memiliki komitmen nyata terhadap pembelaan manusia. Pandangannya bahwa "teologi harus berpihak pada manusia tertindas; dari Tuhan kembali ke manusia, dari langit kembali ke bumi" (Hassan Hanafi, Left Islam, 2013) menggambarkan dengan jelas bagaimana konsep ini mengharuskan agama bergerak secara praksis untuk membela mereka yang dirugikan oleh struktur sosial yang tidak adil.

Dalam kaitannya dengan kondisi pekerja migran di UEA yang kerap menjadi korban eksploitasi, seperti tidak menerima upah layak, bekerja dalam kondisi berbahaya, hingga menghadapi penahanan paspor, konsep Islam Kiri memberikan pijakan untuk menilai bahwa praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai inti Islam. Islam Kiri secara tegas memandang bahwa sistem yang menindas dan merendahkan martabat manusia tidak boleh dibiarkan, dan justru harus dikritik sebagai bentuk penyimpangan dari etika keadilan Islam. Oleh sebab itu, perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja migran dapat dianggap sebagai kegagalan moral dalam praktik bernegara. Dengan perspektif ini, Islam Kiri tidak hanya menjadi konsep ideologis, tetapi juga perangkat etis yang mendorong teologi agar berfungsi sebagai pembela hak asasi dan instrumen perubahan sosial. Dengan demikian, konsep Islam Kiri memberikan dasar kuat untuk mengkritik kebijakan dan praktik negara yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

4. METODE PENELITIAN

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena perlakuan buruk pemerintah Uni Emirat Arab terhadap pekerja migran. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika sosial dan politik, yang kompleks.

Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen sebagai metode utama pengumpulan data. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu fenomena perlakuan buruk pemerintah Uni Emirat Arab terhadap pekerja migran. Data yang digunakan bersifat sekunder dan berasal dari beragam bentuk publikasi seperti artikel akademik, jurnal ilmiah, dan buku. Selain itu, sumber terpercaya lainnya seperti laporan resmi dan publikasi dari organisasi internasional dan juga Penggunaan studi dokumen memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan historis mengenai fenomena yang dikaji, sekaligus memberikan landasan teori dan empiris dalam analisis penelitian ini.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perlakuan Pemerintah UAE Terhadap Pekerja Migran

Transformasi ekonomi dramatis Uni Emirat Arab modern setelah ditemukannya minyak pada pertengahan abad ke 20 menciptakan kebutuhan yang besar terhadap tenaga kerja asing. Untuk meregulasikan arus masuk dan status hukum tenaga kerja tersebut, negara-negara Arab di Teluk Persia (termasuk Uni Emirat Arab) menciptakan sistem sponsorship, yang biasa disebut kafala, yang mengikat tempat tinggal pekerja migraine dan izin kerja kepada satu pemberi kerja atau sponsor. Dalam sistem kafala, pemberi kerja pernah memiliki (dan dalam praktisnya masih memiliki) kekuatan untuk mengontrol apakah pekerja migran dapat mengganti pekerjaan mereka, bahkan apakah mereka bisa meninggalkan negara UEA atau bisa memperbarui izin tinggal. Ketergantungan struktural tersebut meletakkan dasar hukum yang membuat pekerja migran rentan terhadap eksploitasi dan tindakkan kriminal lain oleh pemberi pekerjaan dan agen perekrutan (ADHRB, 2024).

Seiring berkembangnya sektor konstruksi, pelayanan domestik, dan sektor pelayanan di Uni Emirat Arab. Organisasi-organisasi hak asasi manusia mulai mendokumentasikan eksploitasi terhadap pekerja migran yang luas yang diakibatkan oleh model sponsorship dan penegakan hukum yang lemah. Laporan dari 2000 sampai 2010 an mendokumentasikan penyitaan paspor secara rutin, waktu kerja yang terlalu banyak, gaji yang tidak dibayarkan, tempat pekerjaan yang berbahaya, akomodasi untuk pekerja yang tidak higienis, pelecehan fisik dan seksual, dan tidak adanya tempat berlindung yang aman atau mekanisme pengaduan yang efektif bagi pekerja yang dieksploitasi (Human Right Watch, 2014).

Meskipun pemerintah UEA telah mengumumkan berbagai reformasi hukum dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kebijakan penyelesaian perselisihan yang lebih cepat dan aturan kontrak kerja yang lebih transparan, perubahan tersebut dinilai banyak pihak belum menyentuh akar masalah sistem kafala. Sejumlah peneliti dan aktivis HAM menekankan bahwa selama izin tinggal pekerja masih sepenuhnya bergantung pada satu sponsor, ketimpangan kekuasaan antara pekerja dan pemberi kerja tetap tidak dapat dihindari. Akibatnya, pekerja migran sering kali enggan melaporkan pelanggaran karena takut akan deportasi atau kehilangan pekerjaan.

Selain itu, peran agen perekrutan di negara asal pekerja turut memperburuk kerentanan yang dihadapi pekerja migran. Banyak pekerja harus membayar biaya

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

perekrutan yang sangat tinggi, yang memaksa mereka mengambil pinjaman atau berutang sebelum berangkat ke UEA. Utang tersebut menciptakan kondisi kerja paksa secara tidak langsung, karena pekerja merasa tidak memiliki pilihan selain menerima kondisi kerja yang buruk untuk melunasi biaya perekrutan. Praktik ini terus berlangsung meskipun ada regulasi internasional yang melarang biaya perekrutan dibebankan kepada pekerja.

Tekanan internasional terhadap UEA juga meningkat seiring munculnya proyek-proyek infrastruktur megah, termasuk pembangunan venue olahraga, pusat bisnis, dan fasilitas pariwisata. Banyak negara, organisasi internasional, dan media global menyoroti bahwa citra modern UEA bertolak belakang dengan kondisi para pekerja migran yang menjadi fondasi pembangunan ekonomi tersebut. Kritik ini mendorong UEA untuk menegaskan komitmen terhadap standar ketenagakerjaan internasional, meskipun implementasinya di lapangan masih sering tidak konsisten.

Di sisi lain, beberapa studi juga menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi pekerja migran tidak hanya berakar pada kebijakan domestik UEA, tetapi juga pada lemahnya proteksi tenaga kerja di negara asal. Pemerintah negara pengirim sering gagal memonitor agen perekrutan, memperkuat diplomasi perlindungan warga, atau menyediakan bantuan hukum yang memadai. Kondisi ini membuat pekerja migran terperangkap dalam rantai struktural yang kompleks, yang melibatkan pemerintah pengirim, pemerintah penerima, agen perekrutan, dan pemberi kerja.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa inisiatif kolaboratif mulai muncul, seperti kerja sama antara UEA dengan organisasi internasional untuk meningkatkan standar akomodasi pekerja, sistem pelaporan anonim, dan inspeksi tenaga kerja yang lebih ketat. Namun, para pengamat menegaskan bahwa reformasi hanya akan efektif jika disertai penghapusan ketergantungan struktural dalam sistem kafala dan penguatan mekanisme penegakan hukum. Tanpa perubahan fundamental tersebut, pekerja migran masih rentan terhadap eksploitasi, terlepas dari reformasi hukum yang diumumkan secara formal.

5.2 Peran Pemerintah UEA dalam Mewujudkan Keadilan bagi Pekerja Migran Menurut Islam Kiri

Pemikiran Islam Kiri Hassan Hanafi menekankan bahwa negara memiliki kewajiban moral untuk berpihak pada kelompok tertindas, termasuk pekerja migran yang menghadapi ketidakadilan dalam sistem kerja di negara-negara Teluk. Dalam kerangka ini, pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pencapaian ekonomi, melainkan juga memastikan bahwa pembangunan tidak dibayar dengan pengorbanan kelompok rentan. Negara dipandang sebagai aktor yang harus menghadirkan tatanan sosial yang adil, sehingga tidak boleh membiarkan sistem yang masih mendiskriminasi tenaga kerja asing. Namun dalam konteks UEA, pekerja migran masih menempati posisi yang sangat subordinat akibat struktur hukum dan pasar tenaga kerja yang mengutamakan warga lokal. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pembebasan yang diajarkan Islam Kiri karena negara tetap mempertahankan pola relasi kerja yang timpang. Hanafi mengajarkan bahwa tujuan utama perubahan sosial adalah mengangkat martabat manusia dan menghapus eksploitasi dalam struktur sosial. Maka kebijakan negara harus diarahkan pada perlindungan, bukan reproduksi ketimpangan. Kritik ini menjadi dasar penting untuk melihat bagaimana praktik UEA gagal memenuhi tuntutan etis Islam Kiri (Reyadi, 2013).

Dalam pemikiran Islam Kiri, negara idealnya mendorong rekonstruksi sosial yang berkeadilan, tapi realitas di UEA menunjukkan adanya jurang besar antara perlindungan bagi warga lokal dan pekerja migran. Elsayed (2024) dalam artikelnya menunjukkan bahwa regulasi tenaga kerja di UEA jauh lebih menguntungkan warga negara yang bekerja di

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



sektor publik, sementara pekerja migran di sektor swasta mengalami jam kerja lebih panjang, perlindungan lebih rendah, dan akses terbatas terhadap tunjangan. Ketimpangan ini memperlihatkan bagaimana kebijakan negara mempertahankan struktur sosial yang hierarkis. Padahal menurut Hanafi, negara harus menjadi agen perubahan yang membongkar sistem dominan yang menindas. Ketika pemerintah tetap membiarkan ketidaksetaraan ini berlangsung. Hal ini menunjukkan negara berpihak kepada logika kapitalistik yang lebih mengutamakan efisiensi daripada martabat manusia. Situasi tersebut semakin memperkuat ketergantungan pada tenaga kerja murah. Maka jelas bahwa negara belum menjalankan peran etis sebagaimana dituntut oleh perspektif Islam Kiri.

Islam Kiri juga menuntut negara untuk melampaui perubahan administratif dan bergerak pada transformasi struktural, tapi UEA justru menerapkan reformasi secara bertahap. Mednicoff (2009) menjelaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan UEA banyak didesain agar terlihat patuh terhadap tuntutan global, tapi tidak secara substansial memperbaiki posisi tawar pekerja migran. Negara masih mempertahankan sistem yang membatasi mobilitas pekerja karena dianggap perlu menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan. Perspektif ini bertentangan dengan nilai pembebasan yang diajarkan Hanafi yang memandang manusia sebagai subjek otonom yang memiliki hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Ketika negara mempertahankan mekanisme yang membuat pekerja bergantung pada majikan, negara ikut melanggengkan struktur yang tidak adil. Model seperti ini menandakan absennya komitmen pada prinsip kesetaraan universal. Dalam konteks Islam Kiri, sistem hukum semacam ini perlu ditransformasi secara radikal.

Bagi Hanafi, negara harus hadir untuk membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan dengan cara menghadirkan rasionalitas sosial yang progresif. Namun, UEA lebih menekankan narasi stabilitas dan pembangunan ekonomi sebagai legitimasi kebijakan ketenagakerjaannya. Akibatnya, pembaruan hukum hanya menyentuh permukaan tanpa mengubah struktur yang membuat pekerja migran tetap berada dalam posisi tidak seimbang. Pekerja migran masih menghadapi banyak hambatan seperti proses perpindahan kerja yang rumit, keterbatasan akses ke perlindungan hukum yang efektif, dan resiko kekerasan serta eksploitasi. Dalam pandangan Islam Kiri, hal seperti ini terjadi karena negara terlalu tunduk pada kepentingan pasar dan biaya produksi yang rendah. Keberpihakan pada kapitalisme semacam ini berlawanan dengan prinsip Hanafi yang mengutamakan pembelaan terhadap kelompok lemah. Maka, peran negara dalam konteks UEA belum menjadi alat pembebasan sosial. Sebaliknya, negara masih menjadi bagian dari struktur yang menindas.

Selain itu, konsep neohumanisme dalam Islam Kiri menuntut negara untuk menggeser pusat orientasi dari kepentingan elit menuju kepentingan rakyat dan pekerja. Namun, di UEA, pekerja migran tetap dikonstruksikan sebagai tenaga kerja sementara yang hanya dihargai selama mereka produktif secara ekonomi. Narasi pembangunan yang digunakan pemerintah sering mengabaikan kontribusi besar pekerja migran dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi modern UEA. Padahal menurut Hanafi, manusia adalah pusat perubahan sosial dan harus menjadi dasar bagi setiap kebijakan publik. Ketika pekerja migran diperlakukan sebagai alat ekonomi, negara melanggar prinsip humanisme yang menjadi ciri utama Islam Kiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa UEA belum menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar kebijakan tenaga kerja. Peran negara

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

masih berorientasi pada pertumbuhan, bukan kesejahteraan kelompok rentan. Maka, konsep neo-humanisme Hanafi belum tercermin dalam praksis pemerintahan UEA.

Dalam perspektif Islam Kiri, pemerintah harus menjadi pelindung martabat manusia dengan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Namun, UEA masih mempertahankan struktur tenaga kerja yang sangat tersegmentasi sehingga menciptakan ketidaksetaraan yang dalam antara warga lokal dengan pekerja migran . Hal ini menunjukkan bahwa negara belum mampu memastikan akses yang setara terhadap hak hukum, jaminan sosial, dan kondisi kerja layak bagi semua tenaga kerja. Negara memang membuat berbagai aturan baru, tapi tidak sepenuhnya efektif tanpa adanya pengawasan ketat dan kemauan politik untuk menghapus ketidakadilan struktural. Menurut Hanafi, keadilan sosial hanya dapat terwujud jika negara secara aktif melawan segala bentuk dominasi dalam relasi sosial. Karena itu, kebijakan UEA saat ini masih jauh dari prinsip emansipatoris Islam Kiri. Situasi ini memperkuat kritik bahwa pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator pembangunan ekonomi daripada pelindung martabat pekerja migran.

Permasalahan pekerja migran di Uni Emirat Arab (UEA) terus menjadi isu penting karena adanya ketimpangan kekuasaan antara pekerja dan majikan, lemahnya perlindungan hukum, serta munculnya praktik-praktik yang bersifat eksploitatif. Jika dianalisis menggunakan pemikiran Islam Kiri Hassan Hanafi, kondisi ini menunjukkan adanya struktur sosial yang tidak adil dan tidak sejalan dengan prinsip pembebasan yang menjadi inti gagasan Hanafi. Bagi Hanafi, negara memiliki tanggung jawab etis untuk membela kelompok tertindas serta membongkar sistem sosial yang menempatkan manusia pada posisi yang tidak bermartabat. Karena itu, sikap dan kebijakan UEA terhadap pekerja migran dapat dikritisi melalui prinsip bahwa teologi harus kembali kepada manusia, terutama mereka yang terpinggirkan.

Pemerintah Uni Emirat Arab seharusnya menempatkan pekerja migran sebagai kelompok yang wajib dilindungi karena dalam pemikiran Islam Kiri Hassan Hanafi, negara memiliki tanggung jawab moral untuk memihak kepada kaum tertindas. Bagi Hanafi, agama harus menjadi kekuatan sosial yang membebaskan manusia dari struktur penindasan, bukan hanya wacana teologis yang jauh dari realitas. Karena itu, perlakuan tidak adil yang dialami pekerja migran di UEA perlu diatasi melalui kebijakan negara yang berorientasi pada keadilan sosial (Hanafi, 2013 – Indoprogress).

Sesuai kerangka Islam Kiri, pemerintah UEA seharusnya menghapus praktik-praktik yang menempatkan pekerja dalam posisi tidak setara, seperti pembatasan mobilitas, kontrol majikan yang berlebihan, atau mekanisme kerja yang membuat buruh tidak berdaya. Dalam pandangan Hanafi, struktur sosial yang menindas harus dibongkar dan digantikan dengan sistem yang menjamin martabat manusia. Karena itu, UEA perlu membangun regulasi ketenagakerjaan yang memberi kebebasan, keamanan, dan perlindungan yang setara bagi pekerja migran (Hanafi, 2000). Selain itu, pemerintah UEA juga seharusnya memberikan perlindungan sosial yang konkret, seperti upah layak, standar tempat tinggal yang manusiawi, jaminan kesehatan, dan akses untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut mendapat balasan. Bagi Hanafi, keadilan tidak cukup dicapai melalui aturan moral, tetapi harus diwujudkan dalam kondisi material dan sosial yang benar-benar berpihak pada kelompok rentan. Pemerintah UEA juga seharusnya menyediakan ruang partisipasi bagi pekerja migran untuk menyampaikan suara mereka dalam kebijakan yang menyangkut hak-hak mereka. Dalam perspektif Islam Kiri, pembebasan tidak dapat terjadi tanpa keterlibatan langsung mereka yang mengalami ketertindasan, karena transformasi sosial harus dibangun bersama-sama dari pengalaman

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



kelompok lemah (Hanafi, 1991). Dengan mengikuti prinsip Islam Kiri, pemerintah UEA seharusnya bergerak dari struktur yang memusatkan kekuasaan pada majikan menuju sistem yang mengutamakan keadilan sosial, kesetaraan, dan penghormatan atas martabat pekerja migran.

6. KESIMPULAN

Perlakuan pemerintah Uni Emirat Arab terhadap pekerja migran tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial-ekonomi yang berakar pada sistem *kafala* dan orientasi pembangunan neoliberal. Modernisasi yang dijalankan oleh UEA memang berhasil menciptakan citra negara maju dan religius, tapi keberhasilan tersebut dibangun melalui praktik-praktik kerja yang menempatkan pekerja migran dalam posisi rentan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa ketidakadilan yang dialami para pekerja bukanlah kasus insidental, melainkan fenomena struktural yang direproduksi melalui kebijakan negara dan hierarki sosial. Pemikiran Islam Kiri Hassan Hanafi memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk menilai ketegangan antara simbolisme Islam dan realitas eksploitatif di lapangan. Hanafi menekankan bahwa agama tidak boleh berhenti pada tataran doktrin, melainkan harus mengambil peran aktif dalam membela kelompok tertindas. Perspektif ini menyingkap paradoks antara klaim moral negara-negara Teluk dan perlakuan mereka terhadap pekerja asing yang justru bertentangan dengan prinsip dasar keadilan Islam.

Selain itu, konsep keadilan sosial dalam Islam Kiri memberikan arah praksis bagi upaya perbaikan dalam sistem ketenagakerjaan di UEA dan negara Teluk lainnya. Dengan menempatkan manusia sebagai pusat nilai moral, pemikiran Hanafi mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengesampingkan martabat serta hak pekerja. Implementasi nilai-nilai Islam seharusnya tercermin melalui kebijakan yang melindungi pekerja, menyediakan akses hukum yang setara, dan menghapus sistem yang menciptakan ketergantungan berlebihan seperti *kafala*. Penelitian ini menyarankan bahwa negara yang mengklaim identitas Islam wajib memastikan struktur sosialnya sejalan prinsip kesetaraan, keadilan, dan pembelaan terhadap kelompok mustadh'afin. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang refleksi mengenai pentingnya teologi pembebasan Islam sebagai perangkat analisis kritis dalam memahami ketimpangan global dan eksploitasi tenaga kerja. Penelitian ini tidak hanya mengkritik kondisi yang ada, melainkan juga menawarkan arah normatif bagi perubahan sosial yang lebih manusiawi. Harapannya, kajian ini dapat menjadi kontribusi akademik untuk mendorong pemaknaan Islam yang lebih progresif dan berpihak pada kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Guthrie, D. (2023). Reconstructing power: Addressing the exploitation of migrant construction workers in the UAE. The Beacon Journal.

Hamza, S. (2015). Migrant labor in the Arabian Gulf: a case study of Dubai, UAE. Pursuit-The Journal of Undergraduate Research at the University of Tennessee, 6(1), 10.

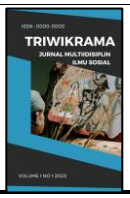
Pangestu, S., Primawanti, H., & Finaldin, T. (2020). Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. Global Mind, 2(2), 26-41.

Parreñas, R. S., & Silvey, R. (2016). Domestic workers refusing neo-slavery in the UAE. Contexts, 15(3), 36-41.

Rosyadi, I. (2022). Karakteristik Gagasan Kiri Islam Hassan Hanafi. Al Qalam, 10(1).

Vora, N. (2013). *Impossible Citizens: Dubai's Indian Diaspora*. Duke University Press.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



Gardner, A. (2010). "Labor Migration and Racialization in the Gulf." *Anthropology of the Middle East*.

Pande, A. (2013). "Gendered Mobility and the Work of Reproduction: Filipina and Sri Lankan Domestic Workers in the Middle East." *Anthropology of Work Review*.

De Bel-Air, F. (2018). "Migrant Domestic Workers in the GCC." *Gulf Labour Markets and Migration Report*.

Keane, D., & McGeehan, N. (2008). "Enforcing Migrant Workers' Rights in the UAE." *International Journal of Minority and Group Rights*.

Jureidini, R. (2009). "Trafficking and Contract Migrant Workers in the Middle East." *International Migration*.

Hanafi, H. (1989). *From Dogma to Revolution*. Cairo: Dar Kebaa.

Abu-Rabi', I. (2003). *Contemporary Arab Thought: Cultural Critique in Comparative Perspective*.

Bayat, A. (2013). *Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East*. Stanford University Press.

Killias, O. (2018). "Follow the Maid: Domestic Worker Migration in and out of Indonesia." *Pacific Affairs*.

Lindquist, J. (2010). "Labour Recruitment, Circuits of Capital and the State in Southeast Asia." *Political Geography*.